



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik dan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat ibarat dua sisi mata uang “*two faces or a coin*”.¹ Dalam sebuah perjalanan pemerintah atau Negara, politik tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Politik yang mengabaikan hukum akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukum tanpa dukungan politik, akan sulit diterapkan. Begitu juga di satu sisi para pemegang kebijakan politik harus tunduk berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan,² di sisi lain hukum itu dibuat sesuai dengan keinginan para pemegang kebijakan politik.

Politik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu didukung oleh instrument yang sifatnya *otoritatif* dan *koersif*.³ Politik juga sebagai penerapan kendali di dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Politik sebagai kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok mempengaruhi orang atau kelompok lain untuk menuruti kehendaknya. Kekuasaan juga dapat mempengaruhi tingkah-laku orang atau kelompok lain sesuai dengan

¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. XII-XIV

² Ma'mun Hamus, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah ala Manhaji Al-Wahyaini Al-Qur'an wa Al-Sunnah Al-Shahihah*, Wizarah al-I'lam Damaskus Syiria, Cet I, hlm 75

³ Abd Al-Adil Ahmad 'Uthwah, *Al-Madkhlm Ila Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Jami'ah Al-Imam, Arab Saudi, Th 1993, hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan dari pelaku politik itu sendiri.⁴ Robert A. Dahl menyatakan bahwa istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan manusia yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan kekuatan fisik.⁵ Politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan berbagai aspek lainnya dalam suatu Negara.

Sebagai instrument yang tidak terpisahkan dari manusia, politik diyakini dapat mempengaruhi beberapa instrument lainnya. Dalam konteks politik hukum, Mahfud MD menyatakan bahwa Politik determinan atas hukum, atau dapat mempengaruhi hukum. Corak politik pada suatu rezim pemerintahan tertentu akan sangat mempengaruhi karakter/produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah rezim tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter *responsif/populistik*, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan berkarakter *ortodoks, konservatif, elitis*.⁶

Tidak dapat dihindari, pengaruh politik pada hukum juga terjadi terhadap hukum Islam. Dinamika dan berlakunya norma hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Misalnya, untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan pengaruh politik dalam suatu negara sehingga

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, hlm 1

⁵ Abd. Muin Salim, *Fikih Siyasah Konspesi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 34.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Jakarta Cet. 6 Th. 2014. hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam dapat direalisasikan. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.⁷

Hukum Islam dapat dipengaruhi oleh arah politik yang ada pada setiap masanya. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut.⁸ Begitu juga politik mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mempertahankan atau mendukung suatu keyakinan dan pengamalan agama masyarakatnya. Pemerintah sebagai pemilik otoritas dalam kebijakan publik juga dianggap sebagai institusi politik yang dapat mempengaruhi keyakinan dan pengamalan agama masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan-kebijakan pemerintah Presiden George W. Bush mengenai inisiatif sosial berbasis keagamaan bisa dilihat sebagai rekonfigurasi ruang *public reason* dengan mengizinkan agama atau, lebih tepatnya, kelompok agama tertentu untuk memberikan pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan publik dengan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan dari Negara. Daftar agama yang dimiliki oleh pemerintah Bush hanya terbatas pada agama-agama monoteis yang cukup familiar keberadaannya dalam budaya sekuler dan agama Kristen di Amerika. Kelompok tertentu seperti The Nation of Islam tidak termasuk dalam daftar.⁹

⁷ Saija, M.H., Iqbal Taufik,., *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Penerbit Depublish, Cet I, Th. 2016 Hlm 86

⁸ Lihat Marzuki Wahid, *Fikih Mazhab Negara*, Lkis, Yogyakarta, Cet I thn 2001, hlm 71

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler*, Penerbit Hikmah 2007, hlm. 272



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lebih dekat dapat dibuktikan dalam realitas politik yang ada pasca reformasi di Indonesia. Bahwa ketika memilih pemimpin perempuan dianggap sebuah pemahaman hukum Islam, ia akan membawa arah perilaku politik yang cukup signifikan dengan antipatinya masyarakat muslim memilih pemimpin perempuan. Politik seakan membawa pemahaman Fikih masyarakat untuk tidak memilih pemimpin perempuan. Begitu juga dengan manifestasi surat Al-Maidah ayat 51 dianggap sebagai pemahaman hukum Islam tentang larangan memilih pemimpin non muslim, ia juga dipengaruhi perilaku politik masyarakat sehingga enggan untuk memilih pemimpin non muslim.

Hukum Islam sebagai manifestasi dari ajaran Islam yang komponen dasarnya 'aqidah dan syari'ah, punya korelasi erat dengan politik dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, hukum Islam sangat dipengaruhi oleh keadaan politik. Implementasinya kemudian diatur dalam syari'at, sebagai katalog-lengkap dari perintah dan larangan Allah, pembimbing manusia dan pengatur lalu lintas aspek-aspek kehidupan manusia yang kompleks.¹⁰ Syari'at adalah tata aturan hukum yang menjadi acuan umat Islam dalam menjalani kehidupan dan demi ketenteraman hidupnya yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya.¹¹ Hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis dan diambil dari dalil yang rinci dikenal dengan istilah Fikih¹². Fikih yang berkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh umat Islam menjadikannya

¹⁰ M. A. Sahal Mahfudh, *Nuansa fiqih sosial*, LKiS Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994, hlm. 207

¹¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu*, (Darul Kutub, 1986) hlm. 6

¹² Abdul Wahab KHLmaf, *"Ilmu Ushul al-Fikih"* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiah, cetakan VIII, thn 1991) hlm. 4



sebagai instrument yang tak terpisahkan dengan pengaruh politik terhadap amalan agama (Fikih) masyarakat.¹³

Politik dan Hukum Islam mempunyai titik singgung erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum Islam tidak hanya dalam tataran mukallaf dan perbuatannya semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekadar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Namun antara hukum Islam dan politik mempunyai keterikatan pengaruh dalam dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan, hanya akan mengaburkan maknanya secara luas dan menutup kontribusi Hukum Islam terhadap politik secara umum.¹⁴ Sering dilupakan bahwa Hukum Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Pemahaman terhadap term politik secara luas, akan memperjelas korelasinya dengan Hukum Islam.

Dalam term pemerintahan Islam, politik juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan hukum Islam. Hal ini terbukti ketika umat Islam pernah kuat secara politik di Madinah yang saat itu Nabi Muhammad sebagai kepala negaranya. Berlanjut pada masa Khalifah ar Rasyidin sampai dinasti Umayyiah dan Abbasyiah dimana hukum Islam menjadi Hukum Pemerintahan. Dan disebabkan kemelut politik yang melanda dunia Islam, termasuk kejatuhan banyak wilayah dunia Islam ke tangan

¹³ Lihat, Tijani Abd Qadir Hamid, *Pemikiran politik dalam Al-Qur'an*, Gema Insani Press, Cet I, Thn 2001, Hlm 5-6

¹⁴ M. A. Sahal Mahfudh, Op.cit, hlm.207



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjajah asing (Barat), mengakibatkan mandeknya perkembangan hukum Islam. Proses pengaruh politik dengan hukum Islam ini terus berlanjut dalam pengamalan dan pemahaman terhadap hukum Islam seperti pengamalan dan pemahaman sebuah mazhab Fikih yang berdimensi lebih parsial.¹⁵ Sehingga mazhab Fikih yang dianut oleh suatu masyarakat / bangsa tidak luput dari pengaruh politik yang mengitarinya.

Mazhab Fikih yang dianut oleh suatu negara mempunyai corak yang berbeda dengan negara lain sesuai dengan kondisi dan keadaan politik yang memberikan pengaruh kepadanya. Perbedaan itu terjadi dimulai dari bagaimana negara - negara menganut suatu mazhab Fikih tertentu yang beragam, sampai bagaimana suatu mazhab yang diamalkan pada tataran aplikatif. Sehingga terjadi perbedaan mazhab pada suatu negara dengan negara yang lain. Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%), penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan). Adapun Mazhab Maliki diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Sedangkan Mazhab Syafi'i memiliki penganut sekitar 28% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Sri Lanka dan menjadi

¹⁵ Mimbar Hukum, Volume 15, Masalah 64, Yayasan Al Hikmah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2004, hlm. 32-33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei.¹⁶ Sedangkan Mazhab Hambali diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab.¹⁷ Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi.¹⁸ Keberagaman mazhab Fikih pada negara-negara tersebut mempunyai latar belakang sejarah yang panjang dengan pengaruh politik yang mengitarinya, sehingga suatu mazhab Fikih melekat pada suatu negara.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, eksistensi mazhab Syafi'i ditenggarai mempunyai hubungan dengan pengaruh politik. Bagaimana kecenderungan Indonesia mengarah kepada mazhab Syafi'i menarik untuk diteliti dalam perspektif sejarah. Keberadaan mazhab Syafi'i di Indonesia bukanlah suatu kebetulan belaka. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi keberadaannya, kemudian diperkuat oleh pengaruh politik dan menjadikannya sebagai mazhab yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia. Faktor-faktor tersebut di antaranya :

1. Pengaruh politik pada sejarah kehadiran Islam di Indonesia.
2. Pengaruh politik kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang bermazhab Syafi'i.
3. Pengaruh politik dalam kiprah para ulama bermazhab Syafi'i.
4. Pengaruh politik pada organisasi-organisasi yang bermazhab Syafi'i.
5. Pengaruh politik pada peradaban Agama dengan mazhab Syafi'i.

¹⁶ Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak-Jejak Islam : Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa Ke Masa*, Penerbit Bunyan, Cet I th. 2015, hlm. 344

¹⁷ A. Qodry Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Saintifik-Modern*, Penerbit Teraju Th. 2003, Hlm. 19.

¹⁸ www.id.wikipedia diakses tanggal 03/01/2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima faktor ini memberikan sumbangsih strategis dalam memperkuat keberadaan mazhab Syafi'i di Indonesia. Pengaruh politik turut *melanggengkan* mazhab Syafi'i dan menjadikannya sebagai Mazhab Negara.

Faktor pertama adalah pengaruh politik pada sejarah kehadiran Islam di Indonesia. Antara para ahli terjadi diskusi panjang mengenai tiga masalah pokok : tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya.¹⁹ Hal ini berdampak seberapa besar pengaruh politik pada tiga masalah pokok tersebut. Ditenggarai bahwa mazhab syafi'i yang dibawa ke Indonesia karena adanya pengaruh politik dari daulah/khilafah Islamiyah tempat dia berasal. Begitu juga dengan para pembawanya yang mendapat dukungan dari khalifah serta waktu masuknya Islam ke Indonesia dengan membawa mazhab Syafi'i berlangsung pada saat berkuasanya khilafah Islamiyah tersebut. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pengaruh politik yang mengitari awal masuknya Islam ke Indonesia.

Faktor kedua, pengaruh politik kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang bermazhab Syafi'i ditenggarai memberikan pengaruh terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia secara politik. Kekuatan politik yang ada pada kerajaan Islam di nusantara yang bermazhab Syafi'i seperti Samudera Pasai, Aceh, Cirebon, Demak, Gowa Tallo, dan Banjar, memperteguh keberadaan dan perkembangan mazhab Syafi'i sehingga menjadi mazhab Negara.

¹⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Penerbit Kencana, Cet I, Th 2013 hlm 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Faktor ketiga yang melatarbelakangi keberadaan Mazhab Syafi'i di Indonesia adalah, pengaruh politik dalam kiprah para ulama bermazhab Syafi'i. Pengaruh politik terjadi dalam dinamika kehidupan mereka, seperti dukungan kerajaan Banjar kepada Syekh Arsyad Al-Banjari selama menuntut ilmu di Hijaz. Hal ini merupakan pengaruh atau dukungan politik pada tokoh tersebut. Sampai pengaruh politik zaman kolonial yang membuat KH. Hasyim Asyari yang bermazhab Syafi'i melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.²⁰

Faktor keempat, Pengaruh politik pada organisasi-organisasi yang bermazhab Syafi'i. Seiring dengan paham pembaharuan yang muncul pada awal abad ke-20 di Indonesia. Posisi mazhab Syafi'i di Indonesia semakin dinamis dengan kekuatan organisasi agama bermazhab Syafi'i yang muncul dan lembaga Pendidikan yang semakin berkembang secara kualitas dan kuantitas. Sebut saja Tarbiyah Islamiyah, Nahdhatul Ulama, Nahdhatul Wathan, dan Al-Washliyah, adalah organisasi-organisasi yang sangat kental memegang teguh mazhab Syafi'i. Dalih mereka bahwa mazhab Syafi'i lebih moderat dan lebih dapat diterima untuk muslim Indonesia menjadikan mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang sangat lekat dengan masyarakat muslim Indonesia. Beberapa Organisasi agama yang bermazhab Syafi'i ini pada pertengahan abad ke-20, karena pengaruh politik, menkonversi diri menjadi organisasi politik yang turut andil dalam percaturan politik di Indonesia. Kondisi ini memperkuat bergaining organisasi bermazhab Syafi'i secara politik, dan dengan

²⁰ Badiatul Rozikin, et. al., *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm 248



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya lembaga pendidikan organisasi-organisasi tersebut secara tidak langsung menjadi wahana ilmiah dalam melestarikan mazhab Syafi'i di sisi lain.²¹

Faktor kelima, pengaruh politik pada peradilan Agama dengan mazhab Syafi'i. Fase masa Orde Lama sampai ke Orde Baru dinamika hukum Islam di Indonesia semakin berkembang khususnya pada peradilan Agama di Indonesia. Sekali lagi mazhab Syafi'i memegang peranan penting dalam memutuskan suatu perkara dalam peradilan agama Islam. Pengaruh politik dapat jelas terlihat pada usaha Pemerintah melalui satuan kerja terkait merumuskan kitab-kitab yang menjadi rujukan hakim pengadilan Agama dalam memutuskan suatu kasus. Melalui Surat Edaran biro Peradilan Agama No. B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura.²² Dalam suatu rapat ketua-ketua Peradilan Agama/Mahkamah Syari'iyah se Indonesia pada tahun 1958 di Surakarta telah mengambil keputusan bahwa Mazhab Syafi'i dipakai sebagai dasar untuk memutuskan perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam.²³ Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan menulis perkara maka para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab sebagai berikut :

1. Al Bajuri, Karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri.

²¹ Siradjuddin Abbas, Op.Cit, hlm. 291

²² Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Gema Insani, Cet II Thn. 2006, hlm 11.

²³ Siradjuddin Abbas, Op.Cit, hlm. 290



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fathul Muin dengan Syarahnya I'anatut Thalibin atau syarah lainnya, karya Imam Zainuddin Al-Malibari.
3. Syarqowi alat Tahrir, Karangan Syekh Zakaria Al-Anshari.
4. Qulyubi/Muhalli, Jalaluddin Al-Mahalli
5. Fathul Wahab dengan Syarahnya, Imam Zakariya Anshari.
6. Tuhfah
7. Targhibul Musytaq
8. Qawaninusy Syar'iyah lisayyid Utsman bin Yahya
9. Qawaninusy Syar'iyah lisayyid Shodaqoh Dkhlan
10. Syamsuri lil Faraidl
11. Bughyatul Mustarsyidin
12. Al Fikih 'ala Muadzahibil Arba'ah
13. Mughnil Muhtaj, Al-Khatib Syarbaini.²⁴

Dari daftar Kitab-kitab ini, sudah dapat dilihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan Hukum Islam di Indonesia. Umumnya Kitab-kitab itu adalah kitab kuno dalam madzhab Syafi'i, kecuali No. 12 termasuk bersifat komperatif atau Perbandingan Madzhab. Begitu juga hampir semua kitab di tulis dalam bahasa Arab kecuali No. 8 di tulis dalam bentuk Arab Melayu.

Pada masa Orde Lama sampai ke Orde Baru pengaruh politik pada perkembangan Mazhab Syafi'i pada peradilan agama semakin mencolok dengan

²⁴ *Kompilasi Hukum Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 1993/1994, hlm 129-130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbitnya Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991. Walaupun Kompilasi Hukum Islam ini hanya terdiri dari persoalan hukum perkawinan, warisan dan wakaf, namun Fikih mazhab Syafi'i sangat memegang peran yang sangat kental sehingga pengaruh politik pada perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia semakin menampakkan wujudnya.²⁵

B. Identifikasi Masalah

Penelitian selalu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Masalah ini biasanya didahului dengan pertanyaan reflektif tentang beberapa isu sehingga menuntut adanya jawaban atau pemecahannya, sehingga menjadi penting untuk dijadikan sasaran penelitian.²⁶

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, penelitian ini mengkaji adanya pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia. Beberapa faktor yang melatarbelakangi keberadaan mazhab Syafi'i di Indonesia sebelum abad ke-20 seperti masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i dan munculnya kerajaan/kesultanan Islam yang bermazhab Syafi'i, peran ulama bermazhab Syafi'i dalam melakukan penyiaran agama Islam dan peradilan Agama di Indonesia yang berlandaskan mazhab

²⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Cet II Thn. 2002, hlm. 149

²⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Grasindo, Thn 2010, hlm. 98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i, menjadi penyebab utama mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang mapan di Indonesia.

Penelitian ini akan menelusuri pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia melalui perspektif sejarah yang membutuhkan rentang waktu tertentu untuk menemukan kesimpulan yang terbatas pada rentang waktu tersebut. Sehingga penelitian sejarah ini lebih dapat dipahami dalam bentuk kronologis dan interpretatif. Yaitu menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa.²⁷

Pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah berkisar dari abad ke XVI sampai dengan abad ke XX. Rentang waktu yang cukup panjang tersebut adalah untuk mengetahui secara global pengaruh politik pada perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia dan menandakan bahwa mazhab Syafi'i di Indonesia relatif tidak berubah ke mazhab yang lain.

Oleh sebab itu identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Meneliti pengaruh politik kerajaan/kesultanan Islam di Indonesia terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia dari abad ke-XVI sampai dengan abad ke-XX.

²⁷ Tri Astuti S.Pd.I, *Buku Pedoman Umum Pelajar Sejarah Rangkuman Inti Sari Sejarah Lengkap*, Lembar Langit Indonesia Thn. 2015, hlm. 58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menelaah pengaruh politik pada peran para ulama bermazhab Syafi'i sehingga memperteguh posisi mazhab Syafi'i di Indonesia pada abad ke-XVI sampai abad ke-XX.
3. Menganalisa pengaruh politik pada kebijakan peradilan Agama Indonesia dalam menjadikan mazhab Syafi'i sebagai landasan dan rujukan peradilan pada abad ke-XX.
4. Meneliti pengaruh politik Organisasi Agama yang bermazhab Syafi'i sehingga mengkonversi diri menjadi partai politik pada abad ke-XX.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah analisa pengaruh politik pada perkembangan mazhab Syafi'i dengan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia dalam perspektif sejarah pada abad ke-XVI sampai abad ke-XX.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana politik dapat mempengaruhi perkembangan suatu Mazhab di Indonesia dianalisa dengan perspektif sejarah.
2. Bagaimana mazhab Syafi'i bisa menjadi mazhab fikih mayoritas di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Untuk menganalisa adanya pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejarah perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Melalui pemahaman terhadap perkembangan mazhab Fikih ini sangat berperan bagi kajian studi Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan dinamika dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan ulama dalam mengetahui dinamika hukum Islam, sehingga pengetahuan tentang hukum Islam dan persoalan Fikih pada masyarakat akan lebih komprehensif.
3. Tulisan ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Hukum Islam dan sekaligus sebagai salah satu sumbangan pemikiran penulis dalam melihat dan menganalisa pola perkembangan mazhab syafi'i.

Pendiri dari madzhab Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris, lahir tepat pada wafatnya Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) pendiri madzhab Ahlus Sunnah, Madzhab Hanafi (tahun 150 H) dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa imam Syafi'i lahir di daerah Ghaza,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syam (palestina) dari keturunan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya, Abdi Manaf.²⁸

Gemilang dan mapannya mazhab-mazhab fikih yang ada hari ini bukanlah berjalan tanpa proses. Sebagai sebuah aliran yang diawali dari *fikrah* personal, mazhab fikih telah menjalani proses yang begitu panjang hingga akhirnya besar dan kokoh serta diterima oleh khalayak. Ada proses dialog dan perdebatan panjang dalam perjalanannya. Itulah kenapa dari sekitar 80 lebih mazhab Fikih yang pernah ada dalam khazanah Islam, hanya 4 yang bisa bertahan utuh sampai hari ini.

Lebih jauh pengklasifikasian mazhab ini diperkuat dengan kondisi masjidil Haram sebelum dikuasai oleh Keluarga Sa'ud pada tahun 1925 sangat kental dengan keberagaman mazhab. Tersebut di dalam sejarah bahwa di dalam masjidil Haram, umat Islam terbagi dalam empat mihrab sesuai dengan empat mazhab yang terkenal di kalangan Sunni pada empat sisi kakbah yang berbentuk kubus. Ada mihrab sholat bagi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali di empat sisi ka'bah yang berbentuk kubus. Masing - masing mazhab mempunyai imam dan jamaah ketika sholat didirikan.²⁹ Mihrab (Maqam) Syafi'i dulu merupakan sebuah balai indah di belakang maqam Ibrahim. Ibnu Jubair melukiskan keempat mihrab itu dan cara shalat dilakukan. Mihrab Maliki adalah mihrab batu, sedangkan mihrab Hanafi dan Hambali adalah balai kayu. Waktu shalat, Imam sholat yang bermazhab Syafi'i mulai

²⁸ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Cet I Thn 2008, hlm. 11

²⁹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Cet. V Th. 1991, hlm. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memimpin shalat lebih dahulu, disusul Imam yang bermazhab Maliki dan Hambali secara bersama, baru kemudian Imam yang bermazhab Hanafi. Mereka berdiri dalam mihrabnya masing-masing atau dalam sebuah selasar³⁰. Namun waktu shalat Magrib mereka memimpin shalat secara serentak.³¹ Kondisi ini menjadi suatu yang lumrah pada periode kebekuan (jumud) Mazhab Fikih³². Umat Islam pun terbagi menjadi empat mazhab dalam persoalan Fikih. Bahkan bagi penganut mazhab-mazhab tersebut pun memiliki pintu-pintu khusus di masjidil haram³³. Jama'ah Haji dengan mazhab yang dianutnya seakan sudah diarahkan menuju mihrab mazhabnya masing-masing. Bukan itu saja, setiap negara yang bermazhab tertentu melalui jamaah hajinya memberikan sumbangan untuk memperindah mihrab dan madrasah mazhabnya. Azyumardi dalam penelitiannya tentang Jaringan Ulama, menyinggung keberadaan madrasah-madrasah serta para guru dari setiap empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).³⁴

Kondisi inilah yang menyebabkan keberagaman mazhab Fikih dan kefanatikan kepadanya menjadi suatu yang tidak dapat dielakkan dan mempengaruhi proses pendalaman ilmu yang dilakukan oleh para penuntut ilmu yang datang ke Negeri Hijaz.

³⁰ Jema'ah yang Sholat kadang lengah dan lalai akibat takbir yang berkumandang dimana-mana. Dapat saja seorang Maliki bersujud bersama dengan seorang yang bermazhab Syafi'i atau Hanafi, atau salah satunya bersalam pada waktu yang salah. Maka kelihatan semua jama'ah memasang telinga untuk mendengar suara Imam atau bilal mereka, supaya tidak salah.

³¹ Henri Chamber-Loir, *Naik Haji di Masa Silam Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji*, KPG, Cet I th 2013, Jilid I, Hlm, 101-103

³² Abd Al-Wahab Khalaf, *Khulashah Tarikh Al-Tasyri' AL-Islamy*, Dar Al-Qalam, hlm.96

³³ Ibnu Jubair, *Rihlah Ibnu Jubair*, Dar Al-Shadir Beirut Th. 1995, hlm 82-85

³⁴ Azyumardi, Op.Cit, hlm 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan negeri Hijaz sebagai pusat sejarah dan agama Islam memotivasi Ulama-ulama pada abad ke-17 untuk "*bermigrasi*" secara masif dalam melaksanakan ibadah Haji di Makkah, dan sebagai moment mendalami ilmu agama kepada guru - guru yang jauh lebih menguasai dibandingkan guru - guru mereka di tanah air.³⁵ Masjidil Haram tempat dimana ka'bah berada sebagai kiblat umat Islam dalam sholat, juga menjadi kiblat ilmu dengan keberadaan para guru / syekh yang mengajarkan ilmu agama dengan metode halaqah, majlis tadrīs dan kuttāb di dalam maupun di luar Masjidil Haram. Sampai sekarang halaqah ilmu agama itu masih dilestarikan di Masjidil Haram yang dikenal dengan "Ma'had al- Haram".³⁶ Indonesia yang secara historis bermazhab Syafi'i, mengantarkan para penuntut ilmu dari nusantara untuk mendalami ilmu agama khususnya Fikih dengan mazhab Syafi'i. Hal ini diikuti oleh pendatang baru (*junior*) yang merantau dengan mengikuti apa yang sudah ditilas oleh para pendahulu (*senior*) mereka yang telah mukim lebih awal.³⁷ Oleh sebab itu keadaan negeri Hijaz dalam keberagaman mazhab sangat mempengaruhi perjalanan sejarah mazhab Fikih yang ada di dunia Islam.³⁸ Hal serupa juga terjadi bagi mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir. Seolah sudah diarahkan, pada Fakultas Syari'ah mahasiswa yang datang akan ditanya dari negara

³⁵ Azyumardi Azra, Op.Cit, hlm. 53

³⁶ Lihat, Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia*, Penerbit Mizan, Thn. 2012, hlm. 113

³⁷ Henri Chamber-Loir, Op.cit, hlm 83-84

³⁸ Lihat, Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, PT. Kompas Media Nusantara, Thn. 2010, Hlm. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mana dan mazhab apa. Kalau dari Indonesia secara langsung bagian administrasi mahasiswa (*su'un thulab*) akan menulisnya dengan mazhab Syafi'i.³⁹

Para penuntut ilmu dari Nusantara yang pergi ke Makkah merupakan ulama ulama yang telah mumpuni dalam ilmu agama. Pada masa kerajaan di Nusantara, kepergian para tokoh agama yang bermazhab Syafi'i mendapat dukungan secara politik sebagai utusan resmi kerajaan seperti yang terjadi di Aceh masa Sultan Iskandar Muda Mahkota alamsyah.⁴⁰ Terlebih ketika mereka pulang membawa hadiah gelar untuk sultan yang mengutus mereka. Seperti Sultan Banten dan Mataram. Gelar Sultan dari Syarif Mekkah dari Kota Suci merupakan gelar kehormatan dan sakral.⁴¹ Pada fase berikut khususnya pada abad ke-17 sampai abad ke- 20 para penuntut ilmu di Mekkah menjadi semakin bertambah. Mereka terdiri dari beberapa generasi yang datang menjadi murid kemudian menjadi guru bagi pendatang baru sesuai dengan *marhalah* (generasi) kedatangannya. tokoh seperti Muhammad Nawawi Albantani, Mahfud Termas, Kholil Bangkalan, Ahmad Khatib Alminangkabawi, Abdussomad Al-Falimbani, Arsyad Al-Banjari, H Abdul Karim Amrullah, KH. Hasyim Asyari (Pendiri NU), adalah orang orang yang bermazhab Syafi'i yang datang ke Makkah dan kembali untuk mewarnai sosial keagamaan Nusantara.⁴² Di antaranya keberagaman mazhab Fikih, perjuangan kemerdekaan, politik dan mendirikan organisasi keagamaan yang tumbuh berkembang sampai saat

³⁹ Pengalaman penulis saat mengikuti perkuliahan Sarjana Strata I di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

⁴⁰ Marzuki Wahid, Op.cit, hlm 115

⁴¹ Henri Chamber-Loir, Op.cit,hlm 28-29

⁴² Ibid, hlm 85-89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Dan tidak sedikit di antara tokoh-tokoh bermazhab Syafi'i ini menjadi Hakim/Qadhi masa kerajaan Islam pada saat tersebut.⁴³

Abad ke-20 merupakan masa kebangkitan kembali hukum Islam menemui momentumnya. Pada masa ini banyak tokoh-tokoh yang mengkritisi taklid terhadap mazhab tertentu. Salah satu karakter masa kebangkitan Islam adalah bagaimana pembaharuan terhadap pemahaman hukum Islam dapat lebih bebas dan tidak mengkultuskan suatu mazhab tertentu. Oleh sebab itu penelitian perkembangan Mazhab Syafi'i pada masa kebangkitan Hukum Islam tersebut di Indonesia menjadi urgen dalam memahami sejarah perkembangan Hukum Islam secara komprehensif.

⁴³ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama dayah: pengawal agama masyarakat Aceh*, Yayasan Nadiya, 2003, hlm. 8